

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Menurut Munir (2002:10), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah negara Indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi permasalahan tersebut. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Penduduk miskin meningkat sangat tajam dari 22,5 juta orang atau 11,34% pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa atau 20,30% pada tahun 1998. Krisis terjadi penambahan penduduk miskin (banyak penduduk menjadi miskin mendadak) sebanyak 27 juta jiwa atau 120%, suatu jumlah yang luar biasa besar. Jumlah penduduk miskin ini secara absolut hampir mendekati jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 yang berjumlah 54,2 juta jiwa. Krisis ekonomi telah berlalu, namun pada tahun 2003 jumlahnya tetap naik, yaitu 37,3 juta jiwa atau 17,42% dari jumlah penduduk Indonesia (Mahri, 2006)

Jawa timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km<sup>2</sup>, dan jumlah

penduduknya 38.847.561 jiwa (2015). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa timur dikenal sebagai pusat kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi yakni berkontribusi 14,85% terhadap produk domestik Bruto. Pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor pendukung pembangunan sebab dengan pertambahan penduduk berarti juga pertambahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar (Sukirno,2001).

Permasalahan dalam bidang kependudukan berpengaruh pada masalah ketenagakerjaan. Dari tahun 2005-2015, Jawa Timur mengalami masalah pertumbuhan penduduk yang signifikan, yakni rata-rata sebesar 1,4 persen tiap tahun. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.71 persen. Angkatan kerja di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2008 yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0,45 persen. Rata-rata peningkatan angkatan kerja yang terjadi di Jawa Timur adalah sebesar 1,9 persen per tahun.

Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang ada. Akibat kurangnya penyerapan tenaga kerja akan menimbulkan pengangguran. Dari tahun 2005-2015, Jawa Timur mengalami pengangguran yang tidak ringan. Pengangguran pada tahun 2006-2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang melebihi 8 persen pertahun. Bahkan pada tahun 2011, tingkat pengangguran 10,27 persen. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 1986-2015 adalah sebesar 1.4 persen, sedangkan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 9 persen. Berikut data tentang tingkat pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, pengangguran, dan presentase bekerja terhadap angkatan kerja dari tahun 1986-2015 tersaji pada tabel 1.1

Tabel 1.1  
Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, Pengangguran Terhadap  
Angkatan Kerja Di Jawa Timur  
Tahun 1986-2015

Tahun	Penduduk (orang)	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran (persen)
Z	30 328 049	13 352 606	1.85
1987	30 606 954	14 547 367	2.23
1988	30 816 391	15 294 576	2.25
1989	30 944 202	15 328 233	2.27
1990	31 112 878	15 432 144	2.17
1991	31 856 287	15 566 687	2.15
1992	32 022 052	15 489 201	2.29
1993	32 206 021	15 589 769	2.46
1994	32 370 441	15 580 195	3.26
1995	32 655 151	15 570 627	3.32
1996	33 089 936	16 414 278	3.47
1997	33 257 524	16 588 550	3.31
1998	33 447 470	16 833 798	4.10
1999	33 654 521	16 982 225	4.95
2000	35 340 101	16 996 862	4.39
2001	35 633 391	17 004 186	6.51
2002	35 930 146	17 011 512	6.43
2003	36 206 106	16 525 698	8.79
2004	36 535 527	17 374 955	7.69
2005	37 070 731	17 689 834	8.51
2006	37 480 743	17 962 624	8.19
2007	36 709 068	18 751 421	6.79
2008	36 974 290	18 882 277	6.42
2009	37 238 158	19 305 056	5.08
2010	37 567 706	18 698 108	4.25
2011	37 886 971	18 604 866	5.38
2012	36 764 014	19 411 256	4.11
2013	47 627 388	19 553 910	4.30
2014	38 612 216	19 306 508	4.19
2015	38 849 576	19 367 777	4.47

Sumber: Statistik Tahunan Jawa Timur, BPS , 1986-2015

Dengan terus bertambahnya jumlah populasi penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun ke tahun disatu sisi memang memberikan dampak positif yaitu tersedianya banyak tenaga kerja yang tersedia. Namun disisi lain karena banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebesar jumlah kesempatan kerja yang tersedia maka banyak penduduk Jawa Timur yang menjadi pengangguran. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan terjadinya terjadinya kelebihan tenaga kerja dan apabila tanpa diikuti dengan perluasan kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah pengangguran.

Selain pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Perekonomian disuatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembanguana ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan

sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2009). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan tenaga kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapat tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu konsisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti Produk Domestik Regional Bruto.

Pembangunan Ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 1999). Sedangkan menurut Todaro (2003), pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat

serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja disebabkan rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dikenal adanya strategi pokok pembangunan yang salah satunya memuat mengenai strategi pembangunan Indonesia. Sasaran pokok dari strategi pembangunan Indonesia adalah untuk pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Hak-hak dasar rakyat yang dimaksudkan adalah dalam bentuk bebas kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar tersebut secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa pemenuhan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan.

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program ini antara lain; penciptaan lapangan kerja yang menandai untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar

wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta perbaikan infrastruktur penunjang.

Peningkatan angkatan kerja baru lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (gap) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi, dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan potensi nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Para pengangguran tidak mempunyai sumber penghasilan untuk memenuhi baik kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan hidup keluarganya.

Inflansi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 2006). Dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran.

Tabel 1.2  
Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1986-2015

Tingkat Pengangguran			
	Tahun	Inflasi (Per sen)	Peningkatan (persen)
1	1986	8.48	1.85
2	1987	9.26	2.23
3	1988	6.46	2.25
4	1989	6.73	2.27
5	1990	6.69	2.17
6	1991	9.97	2.15
7	1992	5.28	2.29
8	1993	10.19	2.46
9	1994	8.25	3.26
10	1995	8.86	3.32
11	1996	6.06	3.47
12	1997	9.11	3.31
13	1998	95.21	4.10
14	1999	1.24	4.95
15	2000	10.46	4.39
16	2001	14.13	6.51
17	2002	9.15	6.43
18	2003	4.23	8.79
19	2004	5.92	7.69
20	2005	15.19	8.51
21	2006	6.76	8.19
22	2007	6.48	6.79
23	2008	9.66	6.42
24	2009	3.62	5.08
25	2010	6.96	4.25
26	2011	4.09	5.38
27	2012	4.5	4.11
28	2013	7.59	4.30
29	2014	7.77	4.19
30	2015	3.08	4.47
	Rata-Rata	10,379	4.52

Sumber : Statistik Jawa Timur, BPS, 1986-2015



Dari tabel 1.2 dapat dilihat perbandingan antara inflasi dengan tingkat pengangguran yang ada di Jawa Timur pada periode waktu tahun 1986-2015. Tingkat inflasi yang ada di Jawa Timur pada kurun waktu tersebut mengalami perubahan. Pada tahun 1998 tingkat inflasi di Jawa Timur mencapai 95.21 persen, merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut. Sedangkan angka terendah pada tingkat inflasi pada periode waktu tersebut adalah pada tahun 1998 sebesar 1.24 persen, dan rata-rata pertumbuhan terakhir adalah sebesar 8.79 persen. Sama dengan besaran tingkat inflasi yang cenderung mengalami fluktuasi, tingkat pengangguran di Jawa Timur juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 1986-2015, pertumbuhan tingkat pengangguran di Jawa Timur mencapai 10,379 persen.

Indikator selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (Sukirno, 2006). PDRB adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Dumairy (1996), menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masih tergolong kepada negara berkembang memiliki tingkat upah yang cukup rendah. Sedangkan menurut hukum Okun, yang melihat hubungan antara tingkat pengangguran dengan PDRB, menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada persentase tingkat pengangguran di suatu negara maka hal tersebut setara dengan terjadinya penurunan terhadap PDRB sebesar 2 persen (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan terhadap tingkat pengangguran suatu

Negara dapat dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan dalam PDRB Negara tersebut (Mankiw, 2000).

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat hubungan tingkat pertumbuhan PDRB dan tingkat pengangguran di Indonesia dalam periode 1986-2015. Tingkat pengangguran di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun 1986 sampai tahun 2015 (Tabel 1.3). Hal ini tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan PDRB di Indonesia yang cenderung mengalami pertumbuhan disamping besaran PDRB yang terus naik dari tahun ke tahun. Rata – rata tingkat pertumbuhan PDRB dari tahun 2006-2015 adalah 1.96 persen.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa besarnya tingkat pengangguran dan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan adanya kenaikan besaran PDRB walaupun tingkat pertumbuhan cenderung lambat. Kontjoro (2003) memperkirakan bahwa, jumlah angkatan kerja sebanyak 2.5 juta jiwa yang muncul setiap tahun tidak akan terserap bahkan dalam jumlah separuhnya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 3 persen. Minimal pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen untuk menyerap angkatan kerja baru tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Choiril Maksun memperkirakan, setiap pertumbuhan PDB sebesar 1 persen dapat menambah jumlah pekerja sekitar 400.000 orang (Suara Karya, 2006).

Tabel 1.3  
 Pertumbuhan Upah dan Pertumbuhan PDRB di  
 Jawa Timur Pada Tahun 1986-2015

Tahun	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan Upah (Persen)	Pertumbuhan Pengangguran (persen)
1986	4.1	2.51	1.85
1987	4.87	2.85	2.23
1988	6.63	2.77	2.25
1989	7.46	2.70	2.27
1990	8.01	2.62	2.17
1991	7.09	-38.62	2.15
1992	7.04	0.83	2.29
1993	7.11	3.47	2.46
1994	7.22	1.68	3.26
1995	8.32	1.73	3.32
1996	8.26	0.77	3.47
1997	11.50	1.53	3.31
1998	-20.99	7.92	4.1
1999	1.21	19.23	4.95
2000	3.26	25.81	4.39
2001	3.33	2.56	6.51
2002	2.76	11.36	6.43
2003	4.78	11.84	8.79
2004	5.83	13.14	7.69
2005	5.84	9.68	8.51
2006	5.80	14.71	8.19
2007	6.11	15.00	6.79
2008	6.16	11.48	6.42
2009	5.01	14.00	5.08
2010	7.46	10.53	4.25
2011	-89.36	11.90	5.38
2012	6.64	5.67	4.11
2013	6.08	16.28	4.3
2014	5.86	15.44	4.19
2015	5.44	0.00	4.47
Rata-Rata	1.96	6.71	4.52

Sumber : Statistik Tahunan Jawa Timur, BPS, 1986-2015

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya.

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2000). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada, semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang akan terjadi (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaganya.

Upah minimum regional merupakan upah minimal yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. (Boediono, 2004) Sedangkan upah rata-rata provinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (Statistik Indonesia, 2012). Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat hubungan antara tingkat pertumbuhan upah dan tingkat pengangguran di Indonesia. Hubungan tersebut berjalan searah.

Walaupun tingkat upah cenderung fluktuatif tetapi besaran tingkat upah yang ditetapkan pemerintah Indonesia terus meningkat besarnya tiap tahun. Besaran upah yang ditetapkan pemerintah pada periode 1986-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000, tingkat upah yang diterima oleh pekerja mengalami peningkatan sebesar 25.81%.

## **B. Rumusan Masalah**

Di Indonesia, pengangguran merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 1986-2015 yang mencapai 9 persen dibandingkan dengan tingkat pengangguran alamiah yang hanya 5-6 persen. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan, oleh karena itu kesejahteraan penduduk meningkat.

Pertumbuhan penduduk akan menambah jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (gap) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Laju inflasi yang tinggi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap jasa bank dan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk barang-barang

nonproduktif, seperti emas dan tanah. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot sehingga sangat merugikan masyarakat penerima upah atau gaji. Dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran.

Kenaikan PDRB akan mengurangi jumlah pengangguran, hal ini sesuai dengan hukum okun yaitu bahwa setiap terjadi peningkatan pada persentase tingkat pengangguran di suatu negara maka hal tersebut setara dengan terjadinya penurunan terhadap PDRB sebesar 2 persen. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut, hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan penduduk mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur
2. Apakah inflasi mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur?
3. Apakah PDRB mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur?
4. Apakah upah mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur?
5. Apakah Dummy (0= sebelum krisis tahun 1998; 1= sesudah krisis tahun 1997) mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh perubahan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Jawa Timur.
4. Menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Jawa Timur.
5. Menganalisis pengaruh dummy (0= sebelum krisis tahun 1998; 1= sesudah krisis tahun 1997) sebelum dan sesudah krisis terhadap tingkat pengangguran terjadi

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak – pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi.
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan gambaran atau keadaan pengangguran di Indonesia.
4. Dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder *time series* tahunan yaitu variabel pertumbuhan penduduk, PDRB, inflasi dan upah terhadap tingkat pengangguran. Data *time series* adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu (bisa kuartalan, tahunan, dan seterusnya). Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa timur.

### 2. Alat dan Metode Analisis

Metode analisis data menggunakan *multiple regression analysis* yang merupakan metode regresi berganda linear. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$UEMP_{it} = \alpha + \beta_1 Inf_t + \beta_2 Log(POP)_t + \beta_3 Log(PDRB)_t + \beta_4 Log(UMR)_t + \beta_5 D1 + \mu_t$$

dimana:

UEMP	:	Tingkat pengangguran
Inf	:	Inflasi
Log(POP)	:	Logaritma Pertumbuhan Penduduk
Log(PDRB)	:	Logaritma Produk Domestik Regional Bruto
Log(UMR)	:	Logaritma Upah
D1	:	Dummy Variabel : 0 = sebelum krisis; 1= sesudah krisis
$\alpha$	:	Konstanta atau intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	:	Koefisien regresi variable bebas
$\mu$	:	Komponen <i>error</i> ( <i>error term</i> )



Untuk melihat penaksiran nilai yang akurat dalam fungsi regresi linier berganda, maka perlu dilakukan uji *goodness of fit* meliputi, uji statistik F, uji determinan  $R^2$ , dan uji t.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik agar model regresi menjadi suatu model yang lebih representatif. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu tahun.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali 2001). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (*scatterplot*) yakni dengan melihat normal *probability* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas lain pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: Apabila nilai *Asymp. Sig. (2 – tailed)*  $\geq$  0,05 data

berdistribusi normal sedangkan jika nilai *Asymp. Sig. (2 – tailed)*  $\geq 0,05$  data tidak berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model terdapat hubungan yang sempurna atau tidak. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005:91). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi yang terbebas dari problem multikolinieritas apabila nilai VIF  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0,10$ , maka data tersebut tidak ada multikolinieritas (Ghozali, 2005:92).

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan grafik Scatteplot. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105). Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai signifikan variabel independen  $< 0,05$  terjadi Heterokedastitas dan apabila nilai Signifikan variabel independen  $> 0,05$  tidak terjadi Heterokedastisitas.

#### d. Uji Statistik F

Menurut (Kuncoro, 2011) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk menguji eksistensi suatu model. Secara teoritis, langkah-langkah uji F dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Formulasi hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ ; model tidak eksis

$H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  ; model eksis

2) Kriteria pengujian

$H_0$  ditolak bila signifikansi statistik  $F \leq \alpha$

$H_0$  diterima bila signifikansi ststiatik  $F > \alpha$

3) Simpulan

Apabila *p-value* < 0.05, maka semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

#### e. Determinasi *Adjusted R-Square* ( $R^2$ )

Menurut (Kuncoro, 2011) koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besarnya prosentase variasi (keragaman) variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model. Nilai koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur besarnya sumbangan atau kontribusi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu maka model dikatakan semakin baik karena menunjukkan semakin tepat atau cocoknya suatu garis regresi serta semakin besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. (Utomo, 2013).

**f. Uji Validitas Pengaruh Model Terpilih (Uji t)**

Uji Validitas Pengaruh Model terpilih menggunakan Uji t. Uji koefisien regresi secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui signifikan dan tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dalam model. Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut (Utomo, 2013):

1) Formulasi hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan

$H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan

2) Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )

3) Menentukan kriteria pengujian

$H_0$  ditolak bila signifikansi statistik  $t_i \leq \alpha$

$H_0$  diterima bila signifikansi statistik  $t_i > \alpha$

#### 4) Simpulan

Apabila  $p\text{-value} < 0.05$ , variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara individu / parsial.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode analisis, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang objek penelitian, populasi dan sampel hipotesis, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, identifikasi variabel, identifikasi operasional variabel, pengukuran operasional variabel dan metode analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pemecahan masalah yang diajukan serta saran-saran yang perlu disampaikan.